

RENCANA KERJA

TAHUN 2018



PEMERINTAH KOTA MADIUN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan D.I Panjaitan Nomor 17 Madiun Kode Pos 63137

Telepon (0351) 462153 Fax. (0351) 462153

Website <http://www.madiunkota.go.id>

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2016 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun telah tersusun. Hal ini tidak terlepas dari peran serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang telah bekerja sama dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja.

Rencana Kerja dimaksud, merupakan gambaran mengenai rencana kerja yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun untuk Tahun Anggaran 2018. Selanjutnya diharapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2018 ini dapat digunakan sebagai media acuan terhadap pelaksanaan kinerja dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan program kerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.

Madiun, 25 Juli 2017

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN



BAMBANG SUBANTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19580906 199803 1 002



WALIKOTA MADIUN

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 050-401.204 / 171 / 2017**

**TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta penyelarasan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut Pasal 96 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan menjadi pedoman unit kerja di Lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2018 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

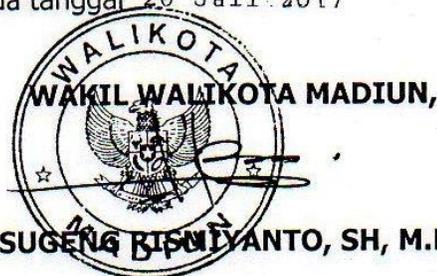
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
- KETIGA :** Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 26 Juli 2017



TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 050-401.204/171 /2017
TANGGAL : 26 Juli 2017

**DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2018**

NO.	PERANGKAT DAERAH
1	2
1.	Sekretariat DPRD
2.	Bagian Umum Sekretariat Daerah
3.	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
4.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
5.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
6.	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
7.	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
8.	Inspektorat
9.	Satuan Polisi Pamong Praja
10.	Rumah Sakit Umum Daerah
11.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
13.	Badan Kepegawaian Daerah
14.	Badan Pendapatan Daerah
15.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17.	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
18.	Dinas Pendidikan
19.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
20.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
21.	Dinas Perhubungan
22.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
25.	Dinas Perdagangan
26.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
27.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
28.	Dinas Tenaga Kerja

NO.	PERANGKAT DAERAH
1	2
29.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
30.	Dinas Lingkungan Hidup
31.	Dinas Komunikasi dan Informatika
32.	Kantor Kecamatan Kartoharjo
33.	Kantor Kecamatan Manguharjo
34.	Kantor Kecamatan Taman


WALIKOTA MADIUN,
H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN**

NOMOR : 050 – 401.205 / 31 / 2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN
TAHUN 2018**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan bersifat indikatif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
12. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014 – 2019;
15. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

17. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Nomor : 050-401.203/26/2014 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Madiun Tahun 2014-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan masing-masing Kepala Bidang agar menjadikan Rencana Kerja (Renja) ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan tahunan.

KETIGA : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : MADIUN
pada tanggal : 25 Juli 2017

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN



BAMBANG SUBANTO, SH

Pembina Tingkat I
NIP. 19580906 199803 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2018 disusun sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat seluruh program dan kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah secara terinci dan terukur yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Penekanannya adalah pada sesuatu yang akan diraih atau diperoleh pada akhir tahun anggaran.

Dengan perencanaan serta penetapan target yang akurat dan Rencana Kerja tentunya akan mempermudah pengukuran pencapaian sasaran dan tujuan dalam akhir periode tahunan nantinya , sehingga akan mempermudah pula dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Akhirnya dapat dilihat pada tercapainya peningkatan kinerja serta terwujudnya akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

Informasi yang disajikan dalam Rencana Kerja ini diupayakan untuk menyampaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun tahun 2018.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagai konsekuensi dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka seluruh program dan kegiatan dalam Perangkat Daerah akan mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dimaksud.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
11. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005 - 2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014 – 2019;
14. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2018 adalah untuk memberikan arah dan acuan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2018. Sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada, maka sepenuhnya program dan kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Rencana Kerja adalah untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dalam kurun waktu satu Tahun Anggaran. Menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada satu tahun kedepan. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan daerah jangka pendek (satu tahun) sebagai penjabaran dan tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2018, sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan target capaian sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

1.4. Sistematika Dokumen Renja Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB. I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Dokumen Renja

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB. II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun lalu dan Capaian Renstra Bakesbangpol.

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol tahun lalu (tahun 2015) dan prakiraan capaian tahun 2016.

2.2. Analisis Kinerja pelayanan Bakesbangpol

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bakesbangpol berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bakesbangpol

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Bakesbangpol dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Bakesbangpol, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bakesbangpol.

2.4. Identifikasi Program dan Kegiatan Pusat dan Provinsi Tahun Rencana (yang terkait dengan Tupoksi)

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKPD

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Bakesbangpol

Berisikan rumusan tujuan dan sasaran Renja Bakesbangpol

3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bakesbangpol

3.3. Program dan Kegiatan Bakesbangpol

Berisikan penjelasan mengenai rekapitulasi program, dan tabel rencana program dan kegiatan.

BAB. VI Penutup

BAB II

PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun lalu dan Capaian Renstra Bakesbangpol.

Keberhasilan dalam mencapai target sasaran di Tahun 2016 tak lepas dari dukungan dana yang ada. Adapun dana yang dianggarkan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun pada tahun 2016 sebesar Rp 3.796.880.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.641.807.763,- (95,92%) dari jumlah dana tersebut digunakan untuk mendukung program dan kegiatan yang ada termasuk kegiatan rutin, Adapun Akuntabilitas Keuangan Tahun 2016 adalah sebagai berikut;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan :

1. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.

Program ini mendapat alokasi dana Rp. 273.888.000,00 terealisasi sebesar Rp. 272.408.065,00 atau 99,45% sisa disetor ke Kasda Rp 1.479.935,00 capaian kinerja dari 2 (dua) kegiatan ini masing-masing tercapai 100%. Dari program tersebut diatas dihasilkan antara lain :

1. Tertib Administrasi surat menyurat;
2. Kelancaran operasional Kantor;
3. Kebutuhan barang cetak dan foto copy
4. Terpenuhinya kebutuhan listrik penerangan Kantor
5. Terwujudnya koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

2. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung dan bangunan,
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
3. Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Prasarana Kantor.

Program ini mendapat alokasi dana Rp. 65.260.000,00 terealisasi sebesar Rp. 64.291.935,00 atau 98,52% sisa disetor ke Kasda Rp. 968.065,00 capaian kinerja dari 3 (tiga) kegiatan ini masing-

masing tercapai 100%. Dari program tersebut diatas dihasilkan antara lain :

1. Gedung kantor yang bersih dan nyaman
2. Kendaraan dinas yang aman dan Nyaman
3. Sarana kantor yang layak pakai

3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ihktisar realisasi kinerja SKPD. Program ini mendapat alokasi dana Rp.15.000.000,00 terealisasi Rp. 14.967.200,00 atau 99,78% sisa disetor ke Kasda Rp. 32.800,00 adapun capaian kinerja dari kegiatan tersebut tercapai 100%. Dari program tersebut diatas dihasilkan :

1. Dokumen perencanaan
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mendapat nilai B

4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan :

1. Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
3. Peningkatan Pembinaan Idiologi dan HAM
4. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat.

Program ini mendapat alokasi dana Rp. 1.614.768.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.525.871.900,00 atau 94,49% sisa disetor ke Kasda Rp.88.896.100,00 capaian kinerja dari 4 (empat) kegiatan ini masing-masing tercapai 100%. Dari program tersebut diatas dihasilkan antara lain :

1. Menurunnya angka konflik
2. Terciptanya suasana aman dan kondusif Kota Madiun

5. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan :

1. Pelestarian Budaya Bangsa
2. Optimalisasi Pembinaan dan Fasilitasi Seni Budaya Bangsa yang Berwawasan Kebangsaan

3. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
4. Peningkatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME
5. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan
6. Pembinaan generasi muda dan pemilihan duta anti narkoba
7. Pembinaan, Verifikasi dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan / LSM

8. Fasilitasi Komunikasi & Koordinasi Ormas / LSM dan Pemuda. Program ini mendapat alokasi dana Rp. 877.964.000,00 terealisasi sebesar Rp. 817.886.000,00 atau 93,16% sisa disetor ke Kasda Rp.12.416.400,00 capaian kinerja dari 8 (delapan) kegiatan ini masing-masing tercapai 100%. Dari program tersebut diatas dihasilkan antara lain :

1. Menurunnya prosentase jumlah konflik antar agama
2. Menumbuhkan semangat patriotisme untuk menjaga kedaulatan NKRI
3. Meningkatnya semangat nasionalisme dan cinta bangsa melalui budaya bangsa

6. Program Pendidikan Politik Masyarakat dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan Pemutakhiran Data, Verifikasi dan Bintel Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol. Program ini mendapat alokasi dana Rp. 54.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 52.416.750,00 atau 97,07% sisa disetor ke Kasda Rp. 1.583.250,00 capaian kinerja dari kegiatan ini tercapai 100%. Dari program tersebut diatas dihasilkan antara lain :

* Tertib administrasi keuangan Parpol

8. Program Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan

1. Pemantauan situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Peningkatan SDM, Sinkronisasi Cegah Dini dan Deteksi Dini terhadap Gangguan Kamtibmas
3. Monitoring dan Evaluasi Ijin Survey / Penelitian

4. Pengendalian Keamanan Lingkungan
5. Penanganan Terpadu Gangguan Keamanan

Program ini mendapat alokasi dana Rp. 896.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 893.965.913,00 atau 99,77% sisa disetor ke Kasda Rp. 2.034.087,00 capaian kinerja dari kegiatan ini tercapai 100%.

Dari program tersebut diatas dihasilkan antara lain :

1. Meningkatnya koordinasi dengan instansi terkait
2. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat

Pengukuran Kinerja Program Bakesbangpol Kota Madiun Tahun 2016

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	CC	B	tercapai

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program pemeliharaan barang milik daerah
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam persoalan kemasyarakatan	a. Prosentase peningkatan pemahaman peserta sosialisasi, dialog, seminar dan workshop	50%	56%
	b. Prosentase Orkemas/LSM yang aktif	70%	65%

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum	a. Prosentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	-	-
	b. Jumlah parpol yang menerima bantuan	10	10

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Prosentase gangguan Kamtibmas yang terpantau	78%	94%

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

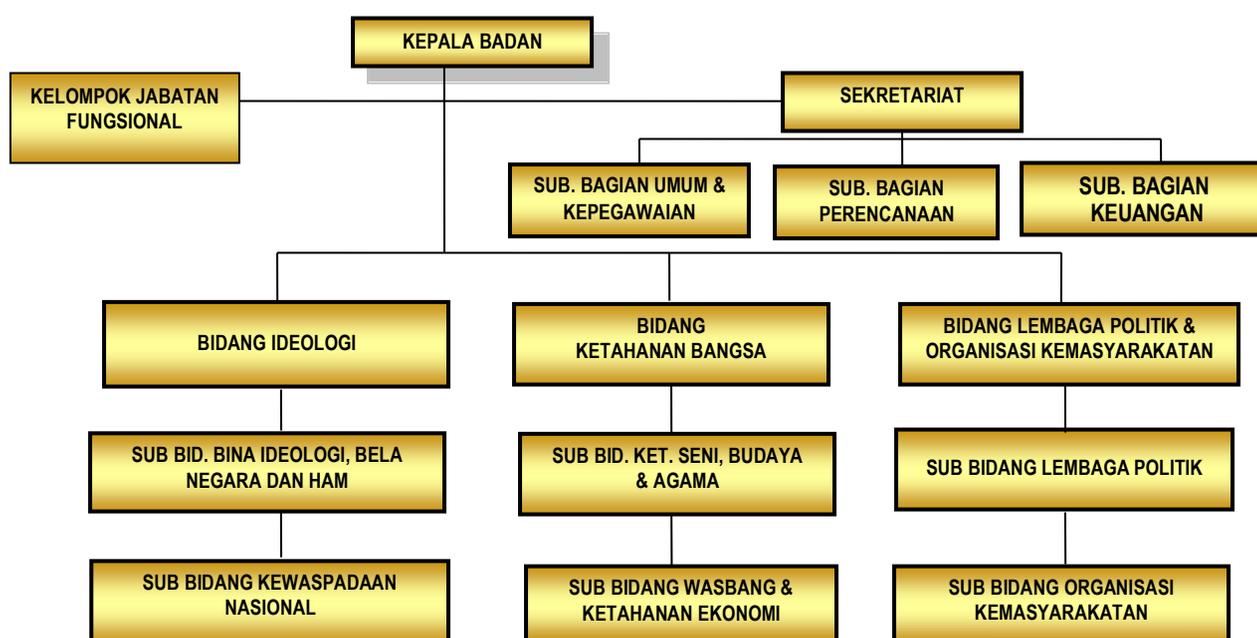
1. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal

2.2. Analisis Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun merupakan unsur pelayanan pemerintah di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, fasilitasi kegiatan politik dan ketahanan bangsa, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Madiun.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, organisasi yang melakukan pelayanan di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, fasilitasi kegiatan politik dan ketahanan bangsa disebut sebagai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun. Namun setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, sebagaimana bagan di bawah ini :

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun



Sumber: Lamp. XII Perda Kota Madiun, Nomor 04 Th. 2013, Tanggal 18 September 2013

Untuk menjalankan kewenangan sebagai unsur pendukung tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa dan politik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang Peraturan Walikota Madiun Nomor Nomor 33 Tahun 2013 tersebut sebagai berikut :

Tugas Pokok : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun maka susunan organisasinya dibentuk sebagai berikut :

a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan

a. Unsur Pembantu : Sekretaris

c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang Ideologi

2. Bidang Ketahanan Bangsa

3. Bidang Lembaga Politik dan Orkemas

Adapun rincian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan bina ideologi, bela negara, Hak Asasi Manusia, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, politik dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 4. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan;
 5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- b. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan badan meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, sekretariat mempunyai fungsi
1. Penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada sekretariat;
 2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
 3. Pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
 4. Pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan badan;
 5. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan badan;
 6. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan badan;
 7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- c. Bidang Ideologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan yang meliputi bina ideologi, bela negara, Hak Asasi Manusia dan kewaspadaan nasional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Ideologi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Ideologi;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina ideologi, bela negara dan Hak Asasi Manusia;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan nasional;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

d. Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan yang meliputi ketahanan seni, budaya, agama, wawasan kebangsaan dan ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang ketahanan bangsa;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan seni, budaya dan agama;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

e. Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan yang meliputi pelaksanaan program kegiatan atau sistem dan implementasi politik serta pelaksanaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan pelaksanaan program kegiatan dan implementasi politik serta evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas serta fasilitas di bidang politik;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang organisasi kemasyarakatan;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Pegawai

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun didukung oleh 33 (tiga puluh tiga) pegawai, baik PNS maupun Tenaga Kontrak Kerja, yang terinci sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	25 orang
2.	Perempuan	7 orang
Jumlah		32 orang

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
1.	PNS	30 orang	7 orang diperbantukan di KPU
2	Tenaga Kontrak	2 orang	-

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

No.	Posisi	Jabatan	Jumlah
1.	Pimpinan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 orang
2.	Sekretariat	Sekretaris	1 orang
		Kasubag	3 orang
		Staf	5 orang
3.	Bidang Ideologi	Kepala Bidang	1 orang
		Kepala Sub Bidang	2 orang
		Staf	2 orang
4.	Bidang Ketahanan Bangsa	Kepala Bidang	1 orang
		Kepala Sub Bidang	2 orang
		Staf	2 orang
5.	Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	Kepala Bidang	1 orang
		Kepala Sub Bidang	2 orang
		Staf	2 orang
6.	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	Sekretaris	1 orang
		Kasubag	3 orang
		Staf	3 orang

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S-2)	1 orang
2.	Sarjana (S-1)	15 orang
3.	Diploma (D-3)	4 orang
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	11 orang
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1 orang
Jumlah		32 orang

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat, Golongan/Ruang

No	Pangkat, Gol./Ruang	Eselon				
		II.b	III.a	III.b	IV.a	Non EsI
1	Pembina (IV/a)	1	1	3		1
2	Penata Tk. I (III/d)				9	4
3	Penata (III/c)					1
4	Penata Muda Tk. I (III/b)					3
5	Penata Muda (III/a)					3
6	Pengatur Tk. I (II/d)					1
7	Pengatur (II/c)					
8	Pengatur Muda Tk.I(II/b)					1
9	Pengatur Muda (II/a)					2
10	Juru Tk. I (I/d)					
11	Juru (I/c)					
12	Juru Muda Tk. I (I/b)					
13	Juru Muda (I/a)					
14	Non PNS					2

2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun didukung dengan sarana dan prasarana, baik sarana fisik maupun non fisik.

Bangunan gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang beralamat di Jalan DI. Panjajatan No. 17 Madiun terdiri dari :

1. Ruang Kepala Badan
2. Ruang Sekretariat
3. Ruang Bidang Idiologi
4. Ruang Bidang Ketahanan Bangsa
5. Ruang Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
6. Ruang Tamu
7. Ruang Rapat
8. Ruang Mushola

Disamping ruangan tersebut di atas, masih terdapat 3 (tiga) buah kamar mandi / WC serta. Dalam mendukung kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pada masing-masing ruangan (kecuali ruang tamu) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun terdapat AC walau tak semuanya berfungsi dengan baik. Selain itu, masing-masing ruangan sudah dilengkapi dengan komputer dan jaringan internet, kecuali Ruang Kepala Badan, Ruang Tamu, Ruang Rapat dan Mushola.

Selain itu, guna memperlancar mobilitas para pegawai, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun tersedia 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dan 23 (dua puluh tiga) unit kendaraan roda 2 (dua).

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun saat ini cukup memadai, namun masih diperlukan beberapa tambahan ataupun perbaikan agar sarana dan prasarana tersebut selalu dalam keadaan siap pakai. Dengan demikian diharapkan pelayanan dan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun semakin meningkat.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang membantu kelancaran pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan tugas sehari-hari secara terperinci adalah sebagai berikut :

**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan
Kota Madiun**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (Tahun Berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
4 8 40 801 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcomes : Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%	
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	35	7	7	7	100%	7	21	60%	
	2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	345	69	64	69	108%	69	207	60%	
4 8 40 801 2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Outcomes : Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%	
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Output : Jumlah gedung/bangunan yang terpelihara	10	2	2	2	100%	1	5	50%	
	2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Output : Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	112	16	24	24	100%	24	64	57%	
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Output : Jumlah sarana prasarana kantor yang terpelihara	35	7	7	7	100%	7	21	60%	
4 8 40 801 5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Outcomes : Persentase dokumen perencanaan / laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%	
	1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Output : Dokumen perencanaan dan laporan yang disusun	25	5	5	5	100%	9	19	76%	

4	8	40	801	15	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Outcomes : Konflik horizontal di dalam masyarakat	0	0	0	0	0%	0	0	0%		
					1	Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Output : Jumlah peserta pembinaan	21.445	4.289	4.289	4.175	97%	790	9.254	43%	
					2	Pemantapan Ideologi dan HAM	Output : Jumlah peserta sosialisasi	3000	600	600	600	100%	600	1800	60%	
					3	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Output : Jumlah peserta sarasehan	875	175	175	175	100%	175	525	60%	
					4	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Output : Jumlah peserta sosialisasi dan lomba	21.350	4.270	4.270	4.270	100%	4.270	12.810	60%	
4	8	40	801	16	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Outcome : Jumlah kemitraan dengan elemen masyarakat	35	7	7	7	100%	7	21	1		
					1	Pelestarian Budaya Bangsa	Output : Jumlah peserta pembinaan	1000	200	200	200	100%	200	600	60%	
					2	Optimalisasi Pembinaan dan Fasilitasi Seni Budaya Bangsa yang Berwawasan Kebangsaan	Output : Jumlah peserta work shop	750	150	150	150	100%	150	450	60%	
					3	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Output : Jumlah pertemuan FKUB	45	9	9	9	100%	10	28	62%	
					4	Peningkatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	Output : Jumlah peserta sarasehan	750	150	150	150	100%	150	450	60%	
					5	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Output : Jumlah peserta sarasehan	600	0	150	150	1	150	300	1	

					6	Pembinaan generasi muda dan pemilihan duta anti narkoba	Output : Jumlah peserta	3.100	0	700	685	98%	800	1.485	0		
					7	Pembinaan, Verifikasi dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan/LSM	Output : Jumlah pengurus Ormas/LSM yang memperoleh pembinaan	500	85	100	99	99%	100	284	1		
					8	Fasilitasi Komunikasi & Koordinasi Ormas / LSM dan Pemuda	Output : Jumlah peserta sarasehan	3.000	591	600	596	99%	600	1.787	1		
					9	Kegiatan Penyusunan database Orkesmas/ LSM	Output : Buku database ormas/LSM	200	100	0	0	0%	0	100	1		
4	8	40	801	17		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Outcome : Prosentase parpol yang memahami regulasi	100%									
						Permutakhiran data, verifikasi dan bintek pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik	Output : Jumlah Parpol penerima bantuan	50	10	10	10	100%	10	30	1		
4	8	40	801	18		Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Outcome : Jumlah tindak kriminal dalam masyarakat	7	7	7	7	100%	7	21	300%		
					1	Pemantauan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Output : Jumlah demo	65	7	13	1	8%	13	21	32%		
					2	Peningkatan SDM, Sinkronisasi Cegah Dini dan Deteksi Dini terhadap Gangguan Kamtibmas	Output : Jumlah peserta pembinaan	4.510	910	900	900	100%	900	2.710	300%		
					3	Monitoring dan Evaluasi Ijin Survey / Penelitian	Output : jumlah ijin survey/penelitian yang dimonitor	1.125	291	225	288	128%	225	804	71%		
					4	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Output : Jumlah koordinasi dgn instansi terkait	28	12	12	12	100%	12	36	129%		
					5	Kegiatan Pemetaan daerah/wilayah yang berpotensi kerawanan/konflik	Output : Jumlah dokumen pemetaan daerah rawan konflik	90	90	0	0	0%	0	90	100%		
					6	Penanganan Terpadu Gangguan Keamanan	Output : Jumlah rakor dgn instansi terkait	28	12	12	12	100%	12	36	129%		

Tabel 2.6
Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Ada Di Bakesbangpol Kota Madiun

No	Nama Barang	Jumlah (Buah/Unit/ Satuan)	Kondisi Aset
1	2	3	4
1.	Mobil	1	baik
2.	Sepeda Motor	23	baik
3.	Filling	2	baik
4.	Brankas	1	baik
5.	Lemari Kaca	2	baik
6.	Papan Visual Kegiatan	2	baik
7.	Papan Nama Instansi	1	baik
8.	Lemari Kayu	7	baik
9.	Kursi Tamu	3	baik
10.	Meja Rapat	3	baik
11.	Meja Tulis Kerja	1	baik
12.	Meja Telepon	2	baik
13.	Kursi Rapat	6	baik
14.	Kursi Tangan	4	baik
15.	Kursi Putar	5	baik
16.	Kursi Lipat	10	rusak ringan
17.	Korden	1	baik
18.	AC	7	baik
19.	Kipas Angin	7	baik
20.	Radio	1	rusak ringan
21.	Laser Disc	1	rusak berat
22.	Wireless	1	rusak ringan
23.	Lambang Garuda Pancasila	2	baik
24.	Gambar Presiden	1	baik
25.	Gambar Wakil Presiden	1	baik
26.	Guci Tempat Air	1	baik
27.	Gerobak Sampah	1	rusak berat

No	Nama Barang	Jumlah (Buah/Unit/ Satuan)	Kondisi Aset
1	2	3	4
28.	Laptop	12	baik
29.	Printer	5	rusak ringan
30.	HT	12	baik
31.	Facsimile	2	rusak berat
32.	Bangunan Gedung	3	baik
33.	LCD	1	baik
34.	Komputer	10	rusak ringan
35.	UPS	1	baik
36.	Kamera	3	baik
37.	Handycam	1	baik
38.	Lensa Kamera	2	baik
39.	Alat Perekam	1	baik
40.	Note Book	4	baik
41.	Mobil	1	baik
42.	Alat Potong Rumput	1	baik
43.	Repeater	1	baik
44.	Base Station	1	baik
45.	Power Mixer	1	baik
46.	Speaker	1	baik
47.	Stand Speaker	2	baik
48.	Kabel Audio	1	baik
49.	Mic Audio	1	baik
50.	Mic Shure	1	baik
51.	Televisi	2	baik
52.	Kursi Lipat Rapat	45	baik
53.	DVD	1	baik

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bakesbangpol

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dapat disusun ke dalam tabel sebagai berikut:

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang diguna- kan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat	Sedang	Peraturan perundangan, perwal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensitas pembinaan Wasbang 2. Cakupan peserta pembinaan Wasbang 3. Kompetensi narasumber 4. Koordinasi antar instansi terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurang pemisah antara masyarakat mampu & tak mampu 2. Munculnya sifat individualis dalam masyarakat 3. Kehidupan yg makin berat & kompleks 4. Tingkat pendidikan masyarakat 	Kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada sebagian kelompok masyarakat
Tingkat partisipasi masyarakat dlm berpolitik	Sedang	Peraturan perundangan, perwal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensitas pembinaan pada masyarakat dan parpol 2. Sosialisasi peraturan perundangan pada masyarakat & anggota parpol 3. Fasilitasi pada partai politik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi politik yg menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politik 2. Sikap apatis masyarakat 3. Tingkat kesadaran masyarakat untuk 	Masih terjadinya fluktuasi partisipasi masyarakat dalam politik

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
				memanfaatkan hak politiknya	
Pemahaman ketahanan bangsa dan bela negara masyarakat	Sedang	Peraturan perundangan, Perwal	1.Koordinasi antar instansi terkait 2.Intensitas pembinaan bela negara 3.Cakupan peserta pembinaan bela negara 4.Kompetensi narasumber	1.Kemajuan teknologi informasi sudah sampai ke daerah 2.Efek globalisasi yang sulit dibendung 3.Tingkat pemahaman masyarakat 4.Munculnya berbagai ormas / LSM	Masih kurangnya pembinaan ketahanan nasional & bela negara kepada organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan & organisasi lembaga swadaya masyarakat

Permasalahan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut :

- 1) Kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada sebagian kelompok masyarakat;
- 2) Masih terjadinya fluktuasi partisipasi politik;
- 3) Masih kurangnya pembinaan ketahanan nasional dan bela negara kepada organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada berbagai elemen masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta partai politik tentang peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemilu dan partai politik;
3. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada ormas / LSM / organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat lainnya tentang wawasan kebangsaan, bela negara dan HAM.

Isu-isu strategis tersebut di atas dianalisis yang berhubungan atau mempengaruhi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dari faktor-faktor eksternal lainnya seperti diuraikan dalam tabel berikut :

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional / Lokal	Lain-lain
1	Paham pembangunan berbasis masyarakat (<i>people centered</i>) yg semakin meluas di negara-negara berkembang	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan	Masyarakat lebih fokus menghadapi kehidupannya masing-masing yang kian kompleks	Partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih rendah
2	Paham pembangunan berbasis masyarakat (<i>people centered</i>) yg semakin meluas di negara-negara berkembang	Kondisi politik di tanah air yang menyebabkan masyarakat menjadi apatis dalam berpolitik	Angka golput yang masih cukup tinggi dalam pelaksanaan pemilu	Masyarakat memilih untuk menjadi penonton dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan politik
3	Globalisasi di segala bidang kehidupan	Perkembangan teknologi informasi mempermudah penyebaran paham / aliran yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa	Heterogenitas masyarakat memudahkan munculnya konflik/ permasalahan dalam masyarakat	Semakin lunturnya rasa cinta tanah air dan semangat persatuan membuat semakin mudahnya terjadi benturan dalam masyarakat

Dari berbagai faktor tersebut di atas dapat ditentukan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sebagai berikut :

1. Kurangnya fasilitasi dalam menciptakan kerukunan di dalam masyarakat yang heterogen berpotensi menimbulkan gangguan pada persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Kurangnya fasilitasi kehidupan berpolitik sangat berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan konflik vertikal;
3. Kurangnya fasilitasi terhadap Ormas / LSM / organisasi lainnya berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dalam masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kota Madiun

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Lampiran C.7

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Madiun	Outcomes : Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	Rp. 292.225.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Madiun	Outcomes : Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	Rp. 291.924.000	
	1. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Madiun	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	Rp. 182.200.000	1. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Madiun	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	Rp. 182.200.000	
	2. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Madiun	Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	69 Kali	Rp. 110.025.000	2. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Madiun	Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	69 Kali	Rp. 109.724.000	
2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Madiun	Outcomes : Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	100%	Rp. 78.312.000	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Madiun	Outcomes : Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	100%	Rp. 78.312.000	
	1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung / Bangunan	Kota Madiun	Output : Jumlah gedung/bangunan yang terpelihara	1 Gedung	Rp. 14.400.000	1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung / Bangunan	Kota Madiun	Output : Jumlah gedung/bangunan yang terpelihara	1 Gedung	Rp. 14.400.000	
	2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	Kota Madiun	Output : Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	24 Unit	Rp. 31.632.000	2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	Kota Madiun	Output : Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	24 Unit	Rp. 31.632.000	
	3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Kantor	Kota Madiun	Output : Jumlah sarana prasarana kantor yang terpelihara	7 Unit	Rp. 32.280.000	3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Kantor	Kota Madiun	Output : Jumlah sarana prasarana kantor yang terpelihara	7 Unit	Rp. 32.280.000	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kota Madiun	Outcomes : Persentase dokumen perencanaan / laporan yang disusun tepat waktu	100%	Rp. 20.000.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kota Madiun	Outcomes : Persentase dokumen perencanaan / laporan yang disusun tepat waktu	100%	Rp. 20.000.000	
	1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Madiun	Output : Dokumen perencanaan dan laporan yang disusun	9 Dokumen	Rp. 20.000.000	1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Madiun	Output : Dokumen perencanaan dan laporan yang disusun	9 Dokumen	Rp. 20.000.000	
4	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kota Madiun	Outcomes : Konflik horizontal di dalam masyarakat	0	Rp. 858.000.000	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kota Madiun	Outcomes : Konflik horizontal di dalam masyarakat	100%	Rp. 856.502.000	
	1. Pemantapan Ideologi dan HAM	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta sosialisasi	600 orang	Rp. 198.000.000	1. Pemantapan Ideologi dan HAM	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta sosialisasi	600 orang	Rp. 196.502.000	
	2. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta sosialisasi	4270 orang	Rp. 660.000.000	2. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta sosialisasi	4270 orang	Rp. 660.000.000	

5	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kota Madiun	Outcome : Jumlah kemitraan dengan elemen masyarakat	9	Rp. 1.729.366.000	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kota Madiun	Outcome : Jumlah kemitraan dengan elemen masyarakat	9	Rp. 1.642.062.000	
	1. Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta pembinaan	720 orang	Rp. 685.768.000	1. Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta pembinaan	720 orang	Rp. 647.733.000	
	2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta sosialisasi dan lomba	175 orang	Rp. 80.000.000	2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta sosialisasi dan lomba	175 orang	Rp. 78.560.000	
	3. Pelestarian Budaya Bangsa	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta pembinaan	200 orang	Rp. 90.000.000	3. Pelestarian Budaya Bangsa	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta pembinaan	200 orang	Rp. 88.480.000	
	4. Optimalisasi Pembinaan dan Fasilitasi Seni Budaya Bangsa yang Berwawasan Kebangsaan	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta work shop	150 orang	Rp. 80.000.000	4. Optimalisasi Pembinaan dan Fasilitasi Seni Budaya Bangsa yang Berwawasan Kebangsaan	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta work shop	150 orang	Rp. 74.380.000	
	5. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Kota Madiun	Output : Jumlah pertemuan FKUB	10 kali	Rp. 265.634.000	5. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Kota Madiun	Output : Jumlah pertemuan FKUB	10 kali	Rp. 257.605.000	
	6. Peningkatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta sarasehan	150 orang	Rp. 85.000.000	6. Peningkatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta sarasehan	150 orang	Rp. 80.280.000	
	7. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta sarasehan	150 orang	Rp. 130.768.000	7. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta sarasehan	150 orang	Rp. 126.268.000	
	8. Kegiatan Pembinaan Generasi Muda dalam memperkokoh NKRI dengan penanggulangan Narkoba dan Kenakalan Remaja	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta	800 orang	Rp. 312.196.000	8. Kegiatan Pembinaan Generasi Muda dalam memperkokoh NKRI dengan penanggulangan Narkoba dan Kenakalan Remaja	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta	800 orang	Rp. 288.756.000	
6	Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Madiun	Outcome : Prosentase parpol dan Orkemas yang memahami regulasi	100%	Rp. 562.000.000	Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Madiun	Outcome : Prosentase parpol dan Orkemas yang memahami regulasi	100%	Rp. 555.100.000	
	1. Kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta Penyuluhan	2000 orang	Rp. 350.000.000	1. Kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat	Kota Madiun	Output : Kegiatan Penyuluhan kepada	2000 orang	Rp. 350.000.000	
	2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol	10 porpol	Rp. 54.000.000	2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol	Kota Madiun	Output : Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol	10 porpol	Rp. 51.400.000	
	3. Pembinaan, Verifikasi dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan/LSM	Kota Madiun	Output : Jumlah pengurus Ormas/LSM yang memperoleh pembinaan	100 LSM/Ormas	Rp. 75.000.000	3. Pembinaan, Verifikasi dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan/LSM	Kota Madiun	Output : Jumlah pengurus Ormas/LSM yang memperoleh pembinaan	100 LSM/Ormas	Rp. 70.700.000	
	4. Fasilitasi Komunikasi & Koordinasi Ormas / LSM dan Pemuda	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta sarasehan	600 LSM/Ormas	Rp. 83.000.000	4. Fasilitasi Komunikasi & Koordinasi Ormas / LSM dan Pemuda	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta sarasehan	600 LSM/Ormas	Rp. 83.000.000	

7	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak	Kota Madiun	Outcome : Jumlah tindak kriminal dalam masyarakat	7	Rp 1.235.500.000	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kota Madiun	Outcome : Jumlah tindak kriminal dalam masyarakat	7	Rp 1.217.460.000
	1. Pemantauan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Kota Madiun	Output : Jumlah demo	14 kali	Rp 65.000.000	1. Pemantauan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Kota Madiun	Output : Jumlah demo	14 kali	Rp 65.000.000
	2. Peningkatan SDM, Sinkronisasi Cegah Dini dan Deteksi Dini terhadap Gangguan Kamtibmas	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta pembinaan	900 orang	Rp 200.000.000	2. Peningkatan SDM, Sinkronisasi Cegah Dini dan Deteksi Dini terhadap Gangguan Kamtibmas	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta pembinaan	900 orang	Rp 200.000.000
	3. Monitoring dan Evaluasi Ijin Survey / Penelitian	Kota Madiun	Output : jumlah ijin survey/penelitian yang dimonitor	225 ijin	Rp 46.000.000	3. Monitoring dan Evaluasi Ijin Survey / Penelitian	Kota Madiun	Output : jumlah ijin survey/penelitian yang dimonitor	225 ijin	Rp 45.040.000
	4. Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kota Madiun	Output : Jumlah koordinasi dgn instansi terkait	12 kali	Rp 237.000.000	4. Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kota Madiun	Output : Jumlah koordinasi dgn instansi terkait	12 kali	Rp 230.560.000
	5. Penanganan Terpadu Gangguan Keamanan	Kota Madiun	Output : Jumlah rakor dgn instansi terkait	12 kali	Rp 687.500.000	2. Penanganan Terpadu Gangguan Keamanan	Kota Madiun	Output : Jumlah rakor dgn instansi terkait	12 kali	Rp 676.860.000
	J U M L A H				Rp 4.775.403.000	J U M L A H				Rp 4.661.360.000

**Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2017
Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Kota Madiun**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Madiun	Outcomes : Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	Rp. 292.225.000	APBD Kota	
	1. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Madiun	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	Rp. 182.200.000	APBD Kota	
	2. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Madiun	Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	69 Kali	Rp. 110.025.000	APBD Kota	
2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Madiun	Outcomes : Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	100%	Rp. 78.312.000	APBD Kota	
	1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung / Bangunan	Kota Madiun	Output : Jumlah gedung/bangunan yang terpelihara	1 Gedung	Rp. 14.400.000	APBD Kota	
	2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	Kota Madiun	Output : Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	24 Unit	Rp. 31.632.000	APBD Kota	
	3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Kantor	Kota Madiun	Output : Jumlah sarana prasarana kantor yang terpelihara	7 Unit	Rp. 32.280.000	APBD Kota	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kota Madiun	Outcomes : Persentase dokumen perencanaan / laporan yang disusun tepat waktu	100%	Rp. 20.000.000	APBD Kota	
	1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Madiun	Output : Dokumen perencanaan dan laporan yang disusun	9 Dokumen	Rp. 20.000.000	APBD Kota	

4	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kota Madiun	Outcomes : Konflik horizontal di dalam masyarakat	100%	Rp. 858.000.000	APBD Kota	
	2. Pemantapan Ideologi dan HAM	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta sosialisasi	600 orang	Rp. 198.000.000	APBD Kota	
	4. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta sosialisasi	4270 orang	Rp. 660.000.000	APBD Kota	
5	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan	Kota Madiun	Outcome : Jumlah kemitraan dengan elemen masyarakat	9	Rp. 1.729.366.000	APBD Kota	
	1. Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta pembinaan	720 orang	Rp. 685.768.000	APBD Kota	
	2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta sosialisasi dan lomba	175 orang	Rp. 80.000.000	APBD Kota	
	3. Pelestarian Budaya Bangsa	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta pembinaan	200 orang	Rp. 90.000.000	APBD Kota	
	4. Optimalisasi Pembinaan dan Fasilitasi Seni Budaya Bangsa yang Berwawasan Kebangsaan	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta work shop	150 orang	Rp. 80.000.000	APBD Kota	
	5. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Kota Madiun	Output : Jumlah pertemuan FKUB	10 kali	Rp. 265.634.000	APBD Kota	
	6. Peningkatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta sarasehan	150 orang	Rp. 85.000.000	APBD Kota	
	7. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta sarasehan	150 orang	Rp. 130.768.000	APBD Kota	
	8. Kegiatan Pembinaan Generasi Muda dalam memperkuat NKRI dengan penanggulangan Narkoba dan Kenakalan Remaja	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta	800 orang	Rp. 312.196.000	APBD Kota	

6	Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Madiun	Outcome : Prosentase parpol dan Orkemas yang memahami regulasi	100%	Rp. 562.000.000	APBD Kota	
	1. Kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat	Kota Madiun	Output : Kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat	2000 orang	Rp. 350.000.000	APBD Kota	
	2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol	Kota Madiun	Output : Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol	10 porpol	Rp. 54.000.000	APBD Kota	
	3. Pembinaan, Verifikasi dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan/LSM	Kota Madiun	Output : Jumlah pengurus Ormas/LSM yang memperoleh pembinaan	100 LSM/Ormas	Rp. 75.000.000	APBD Kota	
	4. Fasilitasi Komunikasi & Koordinasi Ormas / LSM dan Pemuda	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta sarasehan	600 LSM/Ormas	Rp. 83.000.000	APBD Kota	
7	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kota Madiun	Outcome : Jumlah tindak kriminal dalam masyarakat	7	Rp 1.235.500.000	APBD Kota	
	1. Pemantauan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Kota Madiun	Output : Jumlah demo	14 kali	Rp 65.000.000	APBD Kota	
	2. Peningkatan SDM, Sinkronisasi Cegah Dini dan Deteksi Dini terhadap Gangguan Kamtibmas	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta pembinaan	900 orang	Rp 200.000.000	APBD Kota	
	3. Monitoring dan Evaluasi Ijin Survey / Penelitian	Kota Madiun	Output : jumlah ijin survey/penelitian yang dimonitor	225 ijin	Rp 46.000.000	APBD Kota	
	4. Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kota Madiun	Output : Jumlah koordinasi dgn instansi terkait	12 kali	Rp 237.000.000	APBD Kota	
	5. Penanganan Terpadu Gangguan Keamanan	Kota Madiun	Output : Jumlah rakor dgn instansi terkait	12 kali	Rp 687.500.000	APBD Kota	
	J U M L A H				Rp 4.775.403.000		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk merealisasikan pelaksanaan misi perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Inti dari perumusan perwujudan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun di atas dipergunakan sebagai dasar dalam perumusan pokok-pokok visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun. Selanjutnya dari keseluruhan pokok-pokok visi yang dilakukan dengan mencari inti perwujudan visi maka dibuatlah pernyataan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sebagaimana tabel di bawah ini :

Perumusan Visi

No.	Perwujudan Visi	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan sejahtera	Berwawasan kebangsaan dan sejahtera	Terwujudnya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang berwawasan kebangsaan menuju Kota Madiun yang sejahtera
2.	Terwujudnya kesadaran dan partisipasi masyarakat	Kesadaran dan partisipasi masyarakat	

Berdasar tabel di atas, maka dapat dirumuskan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2014 – 2019 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Yang Berwawasan Kebangsaan Menuju Kota Madiun Yang Sejahtera”

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun tersebut di atas terdiri dari 2 (dua) pokok-pokok visi, yaitu :

- a. Berwawasan Kebangsaan dan Sejahtera
- b. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Masing-masing pokok-pokok visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2014 – 2019 tersebut di atas dapat dijelaskan sebagaimana tertuang dalam tabel penyusunan penjelasan visi berikut ini :

Tabel 4.3
Penyusunan penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang berwawasan kebangsaan menuju Kota Madiun yang sejahtera	Berwawasan kebangsaan dan sejahtera	Mampu mewujudkan ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya sehingga mampu mengembangkan diri menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera di segala bidang kehidupan
	Kesadaran dan partisipasi masyarakat	Mewujudkan masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran untuk secara aktif turut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh

Berwawasan kebangsaan dan sejahtera adalah mampu mewujudkan ketahanan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya sehingga mampu mengembangkan diri menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera di segala bidang kehidupan, dalam suasana yang kondusif.

Selanjutnya, misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun disusun sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut di atas. Rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan langkah yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat adalah masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran untuk secara aktif turut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh, termasuk di dalamnya ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara dan ikut memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan.

Adapun perumusan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sebagai berikut :

Tabel 4.4
Perumusan Misi

No	Visi	Pokok-pokok Visi	Misi
1.	Terwujudnya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang berwawasan kebangsaan menuju Kota Madiun yang sejahtera	1. Berwawasan kebangsaan dan sejahtera 2. Kesadaran dan partisipasi masyarakat	1. Mewujudkan Ketahanan Bangsa Ideologi dan hak asasi manusia serta Kesadaran berpolitik Bangsa

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2014 - 2019 sebagai berikut :

“ Mewujudkan Ketahanan Bangsa, Ideologi dan Hak Asasi Manusia serta Kesadaran Berpolitik Bangsa ”

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk merealisasikan pelaksanaan misi perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun merupakan penjabaran operasional dari visi dan misi yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun adalah merupakan penjabaran dari misi yang telah dirumuskan, yaitu :

Tujuan dari misi tersebut adalah :

- 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang plural.**
- 2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan berpolitik yang harmonis, dinamis dan demokratis.**

3. Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tentram, tertib dan aman di masyarakat

4.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tiap-tiap tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan hasil antara yang harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan yang sebenarnya. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun atau kelompok sasaran yang dilayani. Penetapan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran di sini dilaksanakan secara rutin dan atau berkelanjutan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu dalam tahun 2014 - 2019.

Sasaran tersebut terdiri dari :

1. Sasaran dari Tujuan ke-1

Potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat

2. Sasaran dari Tujuan ke -2

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu

3. Sasaran dari Tujuan ke-3

Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dengan target kinerja 5 (lima) tahun mulai tahun 2014 - 2019 tertuang di dalam tabel 4.5 berikut ini :

TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang berwawasan kebangsaan menuju Kota Madiun yang sejahtera				
MISI I : Mewujudkan Ketahanan Bangsa, Ideologi dan Hak Asasi Manusia serta Kesadaran Berpolitik Bangsa				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dalam kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang plural	Potensi Konflik SARA	Potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan kepada masyarakat 2. Menggali dan memantapkan kembali rasa cinta tanah air dan bangsa, kesadaran bela negara, seni dan budaya dalam kehidupan masyarakat 3. Menyertakan elemen masyarakat dalam pembinaan / seminar / sosialisasi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara 4. Memasyarakatkan pemahaman dan pengamalan prinsip-prinsip HAM beserta peraturan perundangannya kepada masyarakat 5. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi terhadap ormas / LSM 6. Mendukung dan menciptakan komunikasi antar tokoh umat beragama dlm FKUB 7. Meningkatkan fasilitasi terhadap kegiatan FKUB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi masyarakat 2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui pembinaan ketahanan ideologi, sosial, budaya dan agama 3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi melalui forum partisipasi masyarakat 4. Peningkatan validitas data ormas / LSM 5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar tokoh agama dan masyarakat melalui FKUB 6. Meningkatkan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab dalam kehidupan berpolitik yang harmonis, dinamis dan demokratis	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pelaksanaan pemilu yg aman, langsung, umum, bebas dan rahasia 2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara pusat dan daerah 3. Peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan dan kehidupan politik serta perluasan sistem informasi politik 4. Mendorong tumbuh kembangnya nilai-nilai demokratis pada warga masyarakat 5. Peningkatan peran dan kapasitas pengurus Parpol dalam sistem politik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi politik masyarakat melalui sosialisasi pendidikan politik 2. Peningkatan validasi data parpol 3. Peningkatan pembinaan dan monitoring partai politik 4. Peningkatan monitoring dan pemantauan pelaksanaan pemilu
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya komunikasi dan dialog yg konstruktif antar anggota masyarakat dalam persoalan kemasyarakatan	Penurunan angka kriminalitas	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi antar unsur penyelenggara kamtibmas 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan kamtibmas 3. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparat intelijen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerjasama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban 2. Meningkatkan sistem dan kemampuan dalam kegiatan intelijen daerah 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan

Kebijakan

Kebijakan adalah arah / tindakan untuk mencapai tujuan. Kebijakan disusun sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Madiun.

Adapun **Kebijakan** dari Bakesbangpol adalah sebagai berikut :

- a. Tingkatkan kesadaran masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa.
- b. Tingkatkan koordinasi dan komunikasi antara tokoh masyarakat.
- c. Tingkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik
- d. Tingkatkan kerjasama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.

3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bakesbangpol

MISI I : Mewujudkan Ketahanan Bangsa, Ideologi dan Hak Asasi Manusia serta Kesadaran Berpolitik Bangsa

Sasaran									
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun					
				2015	2016	2017	2018	2019	
Potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Prosentase Potensi konflik yang tidak terjadi	$\frac{\text{Potensi konflik yang tidak terjadi}}{\text{Potensi konflik seluruhnya}} \times 100$	-	54%	56%	100%	100%	100%	

Sasaran									
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun					
				2015	2016	2017	2018	2019	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Prosentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih}}{\text{Jumlah daftar pemilih tetap}} \times 100$	74%	-	-	-	75%	75%	
	Prosentase Orkemas/LSM yang aktif	$\frac{\text{Jumlah Orkemas/LSM yang aktif}}{\text{Jumlah Orkemas/LSM seluruhnya}} \times 100$	65%	72%	65%	70%	72%	75%	

Sasaran									
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun					
				2015	2016	2017	2018	2019	
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Prosentase Potensi gangguan kamtibmas yang tidak terjadi	$\frac{\text{potensi kamtibmas yang terjadi}}{\text{Potensi kamtibmas seluruhnya}} \times 100$	77%	78%	78%	100%	100%	100%	

3.3. Program dan Kegiatan Bakesbangpol

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan di Bakesbangpol adalah pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana program dan kegiatan pada Renstra Bakesbangpol 2014-2019, dan hasil-hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya dengan yang mendukung pelaksanaan tugas di Bakesbangpol. Dengan Jumlah Karyawan karyawan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun diperlukan belanja Gaji dan tunjangan sebesar Rp 2.876.851.000 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan guna melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun didukung personil sebanyak 32 orang terdiri dari 30 orang PNS dan 2 Orang Tenaga Kontrak.

Rencana Kerja Program Kegiatan Sekretariat Bakesbangpol Tahun 2018

Rencana Kerja belanja langsung rutin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sejumlah Rp 436.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) terdiri dari 3 Program dan 6 Kegiatan dengan Rincian sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		323.000.000
1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.000.000
2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	139.000.000
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah		83.000.000
1.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Bangunan	15.400.000
2.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	33.000.000
3.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	35.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		30.000.000
1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000
J U M L A H		436.000.000,-

Rencana kerja Prioritas Program dan Kegiatan

Rencana kerja prioritas program dan kegiatan Bakesbangpol yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 4 program dan 20 kegiatan dibutuhkan biaya sebesar Rp 5.494.650.000,00 (Lima milyar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		850.000.000
1.	Kegiatan Pemantapan Ideologi dan HAM	200.000.000
2.	Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	650.000.000
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		1.564.650.000
1.	Kegiatan Peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan dan bela negara	680.000.000
2.	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai Luhur budaya bangsa	224.650.000
3.	Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	80.000.000
4.	Kegiatan Peningkatan Pembinaan terhadap Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	90.000.000
5.	Kegiatan Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	140.000.000
6.	Kegiatan Pembinaan Generasi Muda Dalam Memperkokoh NKRI dengan Penanggulangan Narkoba dan Kenakalan Remaja	350.000.000
Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Orkemas		1.680.000.000
1.	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol	60.000.000
2.	Kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat	400.000.000
3.	Kegiatan Posko dan Monitoring Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota	1.000.000.000
4.	Kegiatan Pembinaan, Verifikasi dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan / LSM	120.000.000
5.	Kegiatan Fasilitasi Komunikasi & Koordinasi Orkemas / LSM dan Pemuda	100.000.000
Program Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal		1.300.000.000
1.	Kegiatan Pemantauan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	75.000.000
2.	Kegiatan Peningkatan SDM, Sinkronisasi Cegah Dini dan Deteksi Dini Terhadap Gangguan Kamtibmas	225.000.000
3.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ijin survey/ penelitian	50.000.000
4.	Kegiatan Penanganan Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri	250.000.000
5.	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	800.000.000
J U M L A H		5.494.650.000

**Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2018
Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Kota Madiun**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Madiun	Outcomes : Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	Rp. 323.000.000	APBD Kota	
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan	Kota Madiun	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	Rp. 184.000.000	APBD Kota	
	2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Madiun	Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	69 Kali	Rp. 139.000.000	APBD Kota	
2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Madiun	Outcomes : Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	100%	Rp. 83.000.000	APBD Kota	
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung / Bangunan	Kota Madiun	Output : Jumlah gedung/bangunan yang terpelihara	1 Gedung	Rp. 15.000.000	APBD Kota	
	2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	Kota Madiun	Output : Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	24 Unit	Rp. 33.000.000	APBD Kota	
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Kantor	Kota Madiun	Output : Jumlah sarana prasarana kantor yang terpelihara	7 Unit	Rp. 35.000.000	APBD Kota	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kota Madiun	Outcomes : Persentase dokumen perencanaan / laporan yang disusun tepat waktu	100%	Rp. 30.000.000	APBD Kota	
	1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Madiun	Output : Dokumen perencanaan dan laporan yang disusun	9 Dok	Rp. 30.000.000	APBD Kota	

4	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kota Madiun	Outcomes : Konflik horizontal di dalam masyarakat	0%	Rp. 850.000.000	APBD Kota	
	1. Pemantapan Ideologi dan HAM	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta sosialisasi	600 orang	Rp. 200.000.000	APBD Kota	
	2. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta sosialisasi	4270 orang	Rp. 650.000.000	APBD Kota	
5	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan	Kota Madiun	Outcome : Jumlah kemitraan dengan elemen masyarakat	9	Rp. 1.564.650.000	APBD Kota/Provinsi	
	1. Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta pembinaan	720 orang	Rp. 680.000.000	APBD Kota	
	2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta sosialisasi dan lomba	550 orang	Rp. 224.650.000	APBD Kota	
	3. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan	Kota Madiun	Output : Jumlah pertemuan FKUB	10 kali	Rp. 80.000.000	APBD Kota	
	4. Peningkatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta sarasehan	150 orang	Rp. 90.000.000	APBD Kota	
	5. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta sarasehan	150 orang	Rp. 140.000.000	APBD Kota	
	6. Kegiatan Pembinaan Generasi Muda dalam memperkokoh NKRI dengan penanggulangan Narkoba dan Kenakalan Remaja	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta	800 orang	Rp. 350.000.000	APBD Kota	
6	Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Madiun	Outcome : Prosentase parpol dan Orkemas yang memahami regulasi	100%	1.680.000.000		
	1. Kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta Penyuluhan	2000 orang	400.000.000	APBD Kota	

	2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol	10 porpol		60.000.000	APBD Kota	
	3. Pembinaan, Verifikasi dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan/LSM	Kota Madiun	Output : Jumlah pengurus Ormas/LSM yang memperoleh pembinaan	100 LSM/Ormas		120.000.000	APBD Kota	
	4. Fasilitasi Komunikasi & Koordinasi Ormas / LSM dan Pemuda	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta sarasehan	600 LSM/Ormas		100.000.000	APBD Kota	
	5. Kegiatan Posko dan Monitoring Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota	Kota Madiun	Output : Petugas caraka, Tim Posko dan Monitoring Pemilu Kada	360 orang		1.000.000.000	APBD Kota	
7	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kota Madiun	Outcome : Jumlah tindak kriminal dalam masyarakat	17	Rp.	1.400.000.000	APBD Kota	
	1 Pemantauan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Kota Madiun	Output : Jumlah demo	14 kali	Rp	75.000.000	APBD Kota	
	2 Peningkatan SDM, Sinkronisasi Cegah Dini dan Deteksi Dini terhadap Gangguan Kamtibmas	Kota Madiun	Output : Jumlah peserta pembinaan	900 orang	Rp	225.000.000	APBD Kota	
	3 Monitoring dan Evaluasi Ijin Survey / Penelitian	Kota Madiun	Output : jumlah ijin survey/penelitian yang dimonitor	225 ijin	Rp	50.000.000	APBD Kota	
	4 Penanganan Terpadu Gangguan Keamanan	Kota Madiun	Output : Jumlah rakor dan sosialisasi	5 kali	Rp	250.000.000	APBD Kota	
	5 Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kota Madiun	Output : Jumlah rakor dan sosialisasi	19 kali	Rp	800.000.000	APBD Kota	
	J U M L A H					Rp. 5.930.650.000		

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN TAHUN 2018**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	DANA	SUMBER DANA	LOKASI
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
PROGRAM MANGROVE				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terlaksananya tertib administrasi perkantoran	100%	323.000.000		Bakesbangpol
				Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	184.000.000	APBD	Bakesbangpol
				Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	69 kali	139.000.000	APBD	Bakesbangpol
				Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Prosentase barang inventaris dalam kondisi baik	100%	83.000.000		Bakesbangpol
				Pemeliharaan rutin / berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung/ bangunan yg terpelihara	1 unit	15.000.000	APBD	Bakesbangpol
				Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yg terpelihara	24 unit	33.000.000	APBD	Bakesbangpol
				Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yg dipelihara	7 jenis	35.000.000	APBD	Bakesbangpol
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase tertib administrasi pe-rencanaan dan pelaporan	100%	30.000.000		Bakesbangpol
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jenis dokumen perencanaan dan laporan yang disusun	9 jenis	30.000.000	APBD	Bakesbangpol

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	DANA	SUMBER DANA	LOKASI
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
				Kinerja SKPD					
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang plural	Potensi Konflik SARA	Potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Prosentase Potensi konflik yang tidak terjadi	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Konflik horisontal di dalam masyarakat	0	850.000.000		
				Pemantapan Ideologi dan HAM	Jumlah peserta sosialisasi	600 orang	200.000.000	APBD	Kota Madiun
				Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi dan lomba	4.270 orang	650.000.000	APBD	Kota Madiun
				Program Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kemitraan dengan elemen masyarakat	9	1.564.650.000		
				Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Jumlah peserta pembinaan	790 orang	680.000.000	APBD	Kota Madiun
				Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta sarasehan	550 orang	224.650.000	APBD	Kota Madiun
				Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah pertemuan FKUB	9 kali	80.000.000	APBD	Kota Madiun
				Peningkatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	Jumlah peserta sarasehan	150 orang	90.000.000	APBD	Kota Madiun
				Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah peserta sarasehan	150 orang	140.000.000	APBD	Kota Madiun

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	DANA	SUMBER DANA	LOKASI
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
				Pembinaan Generasi Muda Dalam Memperkokoh NKRI dengan Penanggulangan Narkoba dan Kenakalan Remaja	Jumlah peserta	800 orang	350.000.000	APBD	Kota Madiun
Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab dlm kehidupan berpolitik yang harmonis, dinamis dan demokratis	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu	Prosentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Orkemas	Prosentase parpol dan Orkemas yang memahami regulasi	100%	1.680.000.000		
				Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan	2.200 orang	400.000.000	APBD	Kota Madiun
				Kegiatan Posko dan Monitoring Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota	Petugas caraka dan Tim Posko dan monitoring Pemilu Kada	360 orang	1.000.000.000	APBD	Kota Madiun
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan Partai Politik	Jumlah peserta pengelolaan keuangan Parpol	10 parpol	60.000.000	APBD	Kota Madiun
			Prosentase Ormas/LSM yang aktif	Pembinaan, Verifikasi dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan/LSM	Jumlah pengurus Ormas/LSM yang memperoleh pembinaan	150 orang	120.000.000	APBD	Kota Madiun
				Fasilitasi Komunikasi & Koordinasi Ormas / LSM dan Pemuda	Jumlah peserta sarasehan	150 orang (6 kali)	100.000.000	APBD	Kota Madiun

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	DANA	SUMBER DANA	LOKASI
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tenang, tertib dan aman dimasyarakat	Penurunan angka kriminalitas	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Prosentase potensi gangguan kamtibmas yang tidak terjadi	Pemantauan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah pemantauan Kamtibmas	72	75.000.000	APBD	Kota Madiun
				Peningkatan SDM, Sinkronisasi Cegah Dini dan Deteksi Dini terhadap Gangguan Kamtibmas	Jumlah peserta yg memperoleh pembinaan, sosialisasi	900 orang	225.000.000	APBD	Kota Madiun
				Monitoring dan Evaluasi Ijin Survey / Penelitian	Jumlah ijin survey / penelitian yang dimonitor	230 ijin	50.000.000	APBD	Kota Madiun
				Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah rakor dan sosialisasi	19 kali	800.000.000	APBD	Kota Madiun
				Penanganan Terpadu Gangguan Keamanan	Jumlah rakor dan sosialisasi	5 kali	250.000.000	APBD	Kota Madiun
JUMLAH							5.930.650.000		

Madiun, 27 Juli 2017
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA MADIUN
 BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK
BAMBANG SUBANTO, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19580906 199803 1 002

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN
TAHUN : 2018

No.	Sasaran Strategis		
	Uraian	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu	- Prosentase pemilih yang menggunakan hak pilinya dalam Pemilu - Prosentase Orkemas /LSM yang aktif	- 75% - 72%
2.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	- Prosentase Potensi gangguan kamtibmas yang tidak terjadi	- 100%
3.	Potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat	- Prosentase Potensi konflik yang tidak terjadi	- 100%


KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN
BAMBANG SUBANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19580906 199803 1 002

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun disusun dalam rangka memberikan arah dan acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2018, dimana proses penyusunannya dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku jabatan di Perangkat Daerah.

Melalui tahapan perencanaan ini diharapkan dokumen perencanaan pembangunan mampu mengakomodasi seluruh program kegiatan sesuai prioritas yang tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang ada.

Pada akhirnya untuk penyempurnaan dokumen perencanaan ini sangat diharapkan terciptanya komunikasi dua arah dari seluruh komponen pemangku yang berkepentingan untuk memberikan masukan dan saran guna meningkatkan kualitas perencanaan.

Madiun, 25 Juli 2017

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN

BAMBANG SUBANTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19580906 199803 1 002